

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dari rangkaian pembangunan Kabupaten Wonosobo, yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan visi “ Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera untuk Semua”. Dari visi tersebut terlihat secara jelas arah tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yaitu terciptanya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera di segala bidang yang akan diraih melalui pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk menjabarkan visi tersebut dalam kerangka operasional, maka diuraikan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, melalui pelaksanaan program kerja pemerintah daerah selama lima tahun. Adapun hubungan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 :

Tabel IV.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara			
Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan	1	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Indeks Demokrasi
	2	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Indeks Toleransi
	3	Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	Indeks Gotong Royong
	4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Rasa Aman

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik.	1 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 3: Meningkatkan kemandirian daerah		
Meningkatkan produktivitas, Kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari	1 Meningkatkan produksi dan produktivitas daerah	1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 3. Laju Inflasi 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. Skor PPH 6. Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi tingkat provinsi 7. Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat nasional
	2 Meningkatnya daya saing daerah	1. Produktivitas daerah 2. PDRB per kapita (juta rupiah) 3. Indeks kapasitas fiskal daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata		
Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	1. Terpenuhi layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Rata – rata lama sekolah 3. Angka Melek Huruf Penduduk usia 15 tahun ke atas 4. Rata – rata usia harapan hidup 5. Angka kematian ibu 6. Angka kematian bayi 7. Prevalensi balita gizi kurang 8. Prevalensi balita gizi buruk 9. Persentase KK yang mendapatkan akses sanitasi dasar 10. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang
	2. Terpenuhi layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3. Prevalensi kekerasan terhadap anak 4. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> 5. Persentase Penduduk Berakte Kelahiran 6. Presentase Penduduk Ber KTP
	3. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	1. Indeks Gini 2. Indeks Wiliamson

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	4 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan	1. Persentase angka kemiskinan 2. Indeks kedalaman kemiskinan 3. Indeks keparahan kemiskinan
	5 Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 3. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) 4. Tingkat Kesempatan Kerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah		
Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antar kelompok dan antar generasi.	1. Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 2. Persentase Penanganan Sampah
	2. Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan keseimbangan dan keadilan.	1. Persentase desa berlistrik
	3. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	1. Indeks Rawan Bencana 2. Indeks Resiko Bencana

Tabel IV.2

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.a. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Peningkatan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat	Mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi
	Penguatan implementasi kebijakan pelaksanaan Wonosobo Ramah HAM	Meningkatkan kesadaran tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM
1.b. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat
		Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan
		Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung toleransi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan
1.c. Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	Meneguhkan kembali budaya gotong royong sebagai sikap hidup masyarakat	Memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menempatkan penduduk sebagai basis sentral pembedayaan dan prioritas pembangunan
1.d .Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Penguatan pranata sosial dan pengembangan kemitraan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini	Memperkuat pranata sosial melalui kemitraan pemerintah, lembaga dan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Transformasi kebijakan fungsi penegakan Perda	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara proaktif
		Mengembangkan metode penegakan Perda secara lebih partisipatif
	Pengembangan sistem pendukung untuk penanganan gangguan keamanan dan peningkatan ketangguhan masyarakat	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Membangun data basis terintegrasi sebagai sistem penopang perencanaan
		Menguatkan kapasitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif
	Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana	Membangun kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
		Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
	Penataan Manajemen SDM	Membangun sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
	Mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi
	Membangun dan mengembangkan sistem prosedur serta tata kerja birokrasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Mengembangkan sistem penopang pemerintahan dan birokrasi berbasis TIK
		Peningkatan kemudahan dan akses layanan melalui pelayanan terpadu

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menguatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan profesional
		Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
		Mengembangkan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
		Mengembangkan statistik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		Optimalisasi pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi
		Mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan untuk menunjang akuntabilitas
		Mengembangkan birokrasi yang egaliter dan berintegritas
3.a. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan	Peningkatan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan kemitraan hubungan dengan beberapa elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Peningkatan Kualitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata kelola lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan
		Mengembangkan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha
	Peningkatan dan pengembangan pertanian terpadu	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan produksi hasil peternakan dan populasi ternak
		Meningkatkan kelembagaan pertanian
	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta pemberdayaan petani ikan	Meningkatkan produksi perikanan
	Peningkatan dan pengembangan ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian	Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan input produksi
		Meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi
	Peningkatan kualitas produk daerah	Mengembangkan ekspor dan meningkatkan mutu komoditas ekspor
		Mengembangkan industri hulu hilir
	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Menciptakan iklim usaha yang kondusif
	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan kemandirian pangan
		Mendorong konsumsi pangan lokal yang mendukung usaha pertanian
3.b. Meningkatnya daya saing daerah	Penciptaan iklim kreatif, inovatif dan jiwa kewirausahaan yang berorientasi kemajuan	Mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi berkelanjutan
		Mengarahkan litbang daerah sebagai salah satu penopang kemandirian daerah
		Mewujudkan Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal (<i>agro-eco-culture-tourism</i>)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan kapasitas fiskal	Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
		Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah
	Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan investasi dan pengembangan ekonomi	Meningkatkan kemudahan, perlindungan dan kepastian berusaha
		Mengembangkan sistem penopang untuk kemudahan informasi bisnis dan investasi
	Peningkatan karakter berprestasi dan mandiri serta menghargai nilai budaya	Meningkatkan budaya baca dan cerdas bermedia
		Menumbuhkan budaya olahraga dan berprestasi masyarakat
		Menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dan identitas Wonosobo
4.a Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Percepatan pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi masyarakat	Meningkatkan dan pemeratakan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan
		Meningkatkan mutu layanan pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi
		Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan
		Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi penduduk usia dewasa

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemenuhan layanan dasar kesehatan bagi masyarakat	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan
		Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu tenaga kesehatan
		Meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan
		Meningkatkan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan
	Pemenuhan layanan dasar sosial bagi masyarakat	Menyelenggarakan perlindungan sosial secara komprehensif
		Memperkuat peran kelembagaan sosial
	Pemenuhan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat	Menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (<i>backlog</i>)
		Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman
		Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Pemenuhan layanan dasar Pekerjaan Umum bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi)
4.b. Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja
	Peningkatan kesetaraan, keadilan gender dan	Mengarusutamakan gender dan hak anak dalam pembangunan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pemenuhan hak anak	Meningkatkan kapasitas perempuan
	Pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Mengembangkan model pendidikan ramah anak
	Optimalisasi pengendalian kuantitas dan persebaran penduduk melalui pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga	Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses layanan KB
		Meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan dan partisipasi
		Peningkatan KIE dan peran peer to peer grup remaja dalam peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS
	Penjaminan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan adminduk capil	Memperluas akses dan prosedur pelayanan adminduk dan capil
	Penguatan kepastian hukum terhadap hak - hak tanah	Penataan administrasi pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan
4.c. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Pemerataan pembangunan wilayah	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		Memperbesar aksesibilitas wilayah
		Pengembangan pusat pertumbuhan
	Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kawasan	Menciptakan desa pusat pertumbuhan
	Penataan sistem transportasi	Mengembangkan sistem transportasi yang efisien tataran transportasi lokal (tatralok)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang layak
4.d. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu
		Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan kurang mampu
4.e. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja	Peningkatan akses ketrampilan serta optimalisasi pengelolaan aset masyarakat miskin dan sumberdaya lokal
		Meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi masyarakat kelompok rentan
	Peningkatan akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi	Meningkatkan kemudahan akses permodalan termasuk berbagai skema kredit untuk usaha mikro dan rumah tangga
	Penguatan pemberdayaan masyarakat	Mereformulasi upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan dan potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif desa
		Menerapkan <i>One District One Product (ODOP)</i> dan <i>One Village One Product (OVOP)</i> sebagai basis pengembangan potensi lokal
5.a Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara rasional berdasarkan prinsip berkelanjutan	Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan
		Menerapkan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Adopsi dan pengarusutamaan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam <i>assessment program</i>
	Meningkatkan pengelolaan persampahan seara partisipatif	Meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk memperluas cakupan layanan persampahan
	Penerapan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) sebagai salah satu prinsip pembangunan	Meningkatkan kualitas/praktek pertanian ramah lingkungan
	Transformasi perspektif perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman kekayaan hayati dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Mengembangkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta memperluas upaya pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
5.b. Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan;	Peningkatan ketersediaan energi	Peningkatan elektrifikasi rumah tangga
	Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi	Optimalisasi Pemanfaatan sumber- sumber energi alternatif untuk energi baru dan terbarukan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan energi yang menerapkan prinsip hemat energi
5.c. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Peningkatan kemampuan adaptasi dan upaya mitigasi bencana	Pengurangan resiko bencana

4.2. Prioritas Pembangunan Nasional 2020

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pmdengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing maka pada tahun 2020, Pemerintah mengangkat tema **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”** yang dijabarkan pada beberapa prioritas yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan fokus pada :

- a. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
 - b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehata
 - c. Pemerataan Layanann Pendidikan Berkualitas
 - d. Pengentasan Kemiskinan
 - e. Pembangunan Budaya, Karakter dan Prestasi Bangsa
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah dengan fokus pada :
- a. Perluasan Infrastruktur Dasar
 - b. Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
 - c. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
 - d. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
 - e. Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja dengan fokus pada :
- a. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
 - b. Peningkatan Nilai Tamabh dan Investasi di Sektor Riil
 - c. Peningkata Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
 - d. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponenen Dalam Negeri (TKDN)
 - e. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup dengan fokus pada :
- a. Peningkata Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
 - b. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
 - c. Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
 - d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
 - e. Penguatan Ketahanan Pangan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan fokus pada :
- a. Penguatan Kemampuan Pertahanan
 - b. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

- c. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
- d. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Kemanan Siber dan Penguatan Keamanan Laut
- e. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

Kelima Prioritas di atas untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2020, antara lain meliputi:

- 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,5 %;
- 2. Laju inflasi sebesar 3,5%
- 3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu
- 4. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,0%
- 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,5
- 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8-5,1%

3. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan tahun ke dua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang diarahkan untuk **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Dukung Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas :

- 1) **Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran** dengan fokus pada :
 - a. Penanggulangan kemiskinan, fokus pada :
 - 1. Penyediaan *basic life acces* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya antara lain melalui : akses pendidikan (Beasiswa Siswa Miskin, penyelenggaraan SMK Negeri Boarding School, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK, vokasi bidik miskin); cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; Kartu Jateng Sejahtera; stimulan lumpung pangan pada daerah wrawan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik; pemenuhan kebutuhan dasar PMKS; kemudahan akses memperoleh dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin.

2. Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap modal, manajemen dan pasar; Pengembangan start up wirausaha baru; Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di antaranya dengan peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/ Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia).
3. Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/ TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui Proram “Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan” dengan gotong royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan.

b. Menurunkan angka pengangguran

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link and match.
2. Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan *friendly* bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum.
3. Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja, diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

2) Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah, fokus pada :

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture*, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi masyarakat; pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat di antaranya dengan pemanfaatan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk kegiatan kebudayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui : Peningkatan upaya

penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan *stunting*, penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan; Peningkatan dan pemerataan prasarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; Pembudayaan/ pemassalan olahraga kepada masyarakat didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.

- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui ; Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah

3) Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan, fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya di antaranya :

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui : Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/ asuransi petani; Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep “agriculture estate” (integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai potensi lokal kawasan); peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/ embung dan tampungan air lainnya serta upaya menjaga ketersediaan airnya.
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui : Peningkatan kapasitas, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan/ asuransi nelayan termasuk di dalamnya akses teknologi dan permodalan; Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap; Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; Perbaikan tata niaga perikanan.
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m³ dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah untuk menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok dengan cagangan pangan dan stabilisasi harga konsumsi

pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar.

- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui : pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil dan menengah (modal, pemasaran dan standarisasi produk); pengembangan bahan baku industri substitusi impor; penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi; integrasi antar sektor pendukung.
- f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan daya tarik wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah.
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui : Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat dan tepat serta terbuka; Pengembangan digital investment promotion; Mendoring perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi pemerintah dengan dunia usaha.
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui : peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan nasional dan kabupaten/kota; konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan di antaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmackeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmackeb, Subosukowonosraten, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsepur dan Banglor.
- i. Peningkatan kualitas air, udara , serta tutupan lahan melalui : pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan mulai usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air; konservasi lingkungan (rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir,

konservasi energy, pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan serta audit ebergi); pemulihan kembali lingkungan (penanganan limbah, perijinan pemanfaatan lingkungan dan penegakan hukum).

- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalui : pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengembangan kurikulum pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana.

4) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada :

- a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road show) dan jemput bola serta membangun pemerintahan yang terbuka “open government” (dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aprisasi publik.
- b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola peerintahana).
- c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersi akuntabel : Pengembangan sistem manajemen pembagunan berbasis kinerja ((penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendaian intern pemerintah, pertukaran kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consuting partner, serta pengendalian dan penegakan produk hukum.
- d. Perwujudan sistem manajmen sumberdaya aparatur yang baik dan efisien kelembagaannya, mellauui : Manajemen pengelolaan ASN berdasarkan merit syastem secara transparan, obyektif, dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, pengembangan istem penilaian kinerja, kesejahteraan, promosi terbuka/ talent scouting, analisis jabatan, penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional tertentu); perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik nuansa SARA.

- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminalitas.

Sasaran makro pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 yaitu :

- 1) Pertumbuhan ekonomi antara 5,4 – 5,8 %
- 2) PDRB per kapita sebesar Rp. 28,5 juta
- 3) Inflasi pada angka 3,0 + 1.
- 4) Kemiskinan turun menjadi 9,8 %
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%
- 6) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72
- 7) Indeks Gini sebesar 0,34
- 8) Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,25
- 9) Indeks Williamson sebesar 0,59

3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 diarahkan **“Peningkatan Kualitas Layanan Publik Berbasis Kabupaten Pintar (*smart regency*) untuk Pemantapan Perekonomian Daerah Kabupaten”**

Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ditujukan untuk:

1) Kemiskinan

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan kemampuan sumber daya ekonomi dan sosial secara berkelanjutan, dengan prioritas pada:

- a. Peningkatan sistem perlindungan sosial dan aset termasuk peningkatan kualitas data sasaran program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;
- b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi serta pangan yang difokuskan pada desa/kecamatan prioritas;
- c. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan dan penyediaan akses modal serta pemasaran produk bagi rumah tangga miskin desil 3 dan 4 dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal;

- d. Peningkatan produktivitas rumah tangga miskin serta kelompok rentan melalui pemberdayaan dan fasilitasi berkelanjutan;
- e. Peningkatan koordinasi dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

2) Daya Saing Ekonomi

Peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor basis yaitu pertanian yang didukung oleh sektor lainnya, dengan prioritas pada:

- a. Pemanfaatan teknologi dan inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan, nilai tambah produk pertanian, produktivitas, kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan kemandirian serta swasembada pangan;
- b. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha/industri kecil dan menengah melalui peningkatan SDM, peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk, standarisasi dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, peningkatan akses modal, pemasaran, kemitraan dan penguatan kelembagaan;
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan penguatan kelembagaan sektor finansial untuk memenuhi kebutuhan modal bagi masyarakat UMKM dan rumah tangga miskin desil 3 dan 4;
- d. Pengembangan pariwisata yang berbasis *agro-eco-culture tourism* yang didukung ekonomi kreatif melalui pengembangan atraksi, amenities dan aksesibilitas wisata serta peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku wisata;
- e. Perbaikan iklim investasi yang kondusif dan inovatif dengan kemudahan perijinan dan pengembangan jaringan pemasaran untuk meningkatkan daya saing, sejalan dengan *branding "Wonosobo the Soul of Java"*;
- f. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan penguatan program *link and match*.

3) Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*) dengan prioritas pada:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, inovatif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui : Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk peningkatan kualitas dan

aksesibilitas pelayanan publik, peningkatan sarpras pelayanan publik terutama untuk masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas); dan Penguatan kualitas aparatur pelayanan publik.

- b. Penguatan kualitas reformasi birokrasi, melalui perbaikan tata laksana organisasi, peningkatan kinerja pemerintahan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- c. Penguatan manajemen pemerintah yang berprinsip pada transparansi dan keterbukaan informasi publik melalui : Peningkatan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik dalam pembangunan daerah melalui forum-forum publik, media elektronik/media sosial, dan sistem pengaduan masyarakat; dan Penguatan sistem informasi teknologi dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi.

4) Kualitas SDM

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkompeten dan memiliki daya saing, dengan prioritas pada:

- a. Penerapan paradigma sehat melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat, pencegahan dan penurunan stunting, Percepatan *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Bebas BABS) serta perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Peningkatan akses, mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan sumber daya kesehatan;
- c. Peningkatan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan melalui distribusi sarana, prasarana, mutu pendidik dan kependidikan, pengembangan muatan lokal berbasis ketrampilan, penguasaan teknologi informasi dan peningkatan literasi untuk mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- d. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan sistem perlindungan perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan, penyelenggaraan layanan terpadu dan penerapan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan;

5) Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan prioritas pada:

- a. Peningkatan layanan dan pengelolaan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) melalui :

1. Revitalisasi jaringan drainase menjadi *ecodrain* (drainase ramah lingkungan);
 2. Optimalisasi penanganan sampah secara sistemik dari hulu ke hilir, (bank sampah, pembangunan TPST skala desa/kelurahan dan skala kecamatan, optimalisasi TPA Wonorejo);
 3. Percepatan Pembangunan sistem pengelolaan air limbah di kawasan prioritas (stunting, desa/kecamatan ODF, dan kawasan kumuh).
- b. Peningkatan upaya konservasi lingkungan hidup dengan prinsip kolaborasi para pihak melalui:
1. Pengendalian pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara);
 2. Revitalisasi pertanian ramah lingkungan;
 3. Rehabilitasi lahan kritis;
 4. Konservasi mata air;
 5. Pembangunan sumur resapan dan sumur biopori.
- c. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan resiko bencana dan konservasi lingkungan melalui :
1. Legalisasi rencana detail tata ruang kawasan perkotaan;
 2. Pengendalian tata ruang;
 3. Peningkatan kapasitas kecamatan, desa dan sekolah tangguh bencana.
- d. Percepatan penanganan kawasan kumuh melalui :
1. Penanganan tuntas kawasan kumuh perkotaan IKK Wonosobo;
 2. Percepatan penanganan RTLH.

6) Kesenjangan Wilayah

Pengurangan kesenjangan wilayah yang memiliki kesulitan geografis dan tingkat kemiskinan tinggi, dengan prioritas:

- a. Pemerataan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui :
 1. Peningkatan jalan dan jembatan di kawasan prioritas
 2. Penataan manajemen transportasi
 3. Peningkatan layanan irigasi di Daerah Irigasi (DI) prioritas

- b. Mendorong pusat-pusat pertumbuhan yang dapat meningkatkan kemudahan layanan barang dan jasa melalui :
 1. Pengembangan kawasan perdesaan;
 2. Pengembangan pusat pertumbuhan pada kawasan perbatasan.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2020 antara lain meliputi :

- 1) Pertumbuhan ekonomi antara 5,4 %
- 2) PDRB per kapita sebesar Rp. 23,5 juta
- 3) Inflasi pada angka 3,09
- 4) Kemiskinan turun menjadi 13,1 %
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,44%
- 6) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,2
- 7) Indeks Gini sebesar 0,34
- 8) Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,97
- 9) Indeks Williamson sebesar 0,35

Sasaran pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2020 telah selaras dengan sasaran kewilayahan yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Wonosobo, yang meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi antara 5,4 %
- b. PDRB per kapita sebesar Rp. 28,5 juta
- c. Inflasi pada angka 3,09
- d. Kemiskinan turun menjadi 13,1 %
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%
- f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,88
- g. Indeks Gini sebesar 0,34
- h. Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,97
- i. Indeks Williamson sebesar 0,35

Keselarasan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo dengan sasaran pembangunan provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel. 4.3

Tabel 4.3
Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah

Indikator Sasaran Pembangunan	Target Sasaran Daerah	Target Sasaran Provinsi
Pertumbuhan ekonomi	5,4 %	5,4 – 5,8 %
PDRB per kapita	Rp. 23,5 juta	Rp. 28,5 juta
Inflasi	3,09	3,0 + 1.
Kemiskinan	13,1 %	19,8 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,44%	4,33%
Indeks Pembangunan Manusia	68,2	72
Indeks Gini	0,34	0,34
Indeks Pembangunan Gender	94,97	92,25
Indeks Wlliamson	0,35	0,59

Tabel 4.5.

**Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah/Fokus Daerah
Dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**

No	Prioritas Daerah/ Fokus	Prioritas Provinsi Jawa Tengah
1	Percepatan penanggulangan kemiskinan	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2	Peningkatan daya saing ekonomi daerah	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan
3	Peningkatan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) dan baik (<i>good governance</i>)	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah
4	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkompeten dan memiliki daya saing	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah

No	Prioritas Daerah/ Fokus	Prioritas Provinsi Jawa Tengah
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan
6	Pengurangan kesenjangan wilayah	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan

Tabel 4.6.

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo (angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 mencapai 17,58	Kemiskinan	Percepatan penanggulangan kemiskinan
2	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2017 sebesar 3,16 persen melambat dibandingkan Tahun 2016	Daya Saing Ekonomi	Peningkatan daya saing ekonomi daerah
3	Capaian Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik masih berada pada angka 54,88 (zona kuning) atau dalam kategori kepatuhan sedang.	Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) dan baik (<i>good governance</i>)
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 tercatat sebesar 66,89 masih di bawah Provinsi Jawa Tengah	Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkompeten dan memiliki daya saing
5	Penanganan persampahan masih cukup rendah sebesar 43,49%. Rendahnya Akses sanitasi (58,08%)	Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
6	Persebaran perkembangan pembangunan di Kabupaten Wonosobo belum merata yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson : 0,35 yang mempengaruhi pergerakan arus layanan barang dan jasa yang masih tertumpu di ibukota kabupaten.	Kesenjangan Wilayah	Pengurangan kesenjangan wilayah

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2020 dan indikator kinerjanya yang akan dicapai melalui implementasi prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dijabarkan dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.7.

Keterkaitan Misi, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Daerah Tahun 2020

Misi	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2020	Prioritas 2020
Misi I Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Tujuan I : Meningkatkan Rasa Kemanusiaan, Toleransi dan keharmonisan untuk hidup					
	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	1	Indeks Demokrasi	Angka	74	Peningkatan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) dan baik (<i>good governance</i>)
	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	2	Indeks Toleransi	Angka	> 0.49	
	Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	1	Indeks Gotong Royong	Angka	0.63	

Misi	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2020	Prioritas 2020
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1	Indeks rasa aman	Angka	0.65	
<u>Misi II</u>	Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa					
Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	84	Peningkatan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) dan baik (<i>good governance</i>)
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78	
<u>Misi III</u>	Tujuan III : Meningkatkan produktifitas, Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya dan Membangun Budaya Berdikari					
Meningkatkan kemandirian daerah	Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah	1	PDRB ADHB (juta rupiah/tahun)	(juta/rupee/ tahun)	18,634,470.50	Peningkatan daya saing ekonomi daerah
		2	PDRB ADHK (juta rupiah/tahun)	(juta/rupee/ tahun)	13,316,326.20	

Misi	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2020	Prioritas 2020
		3	Laju Inflasi	%	3.09	
		4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,4	
		5	PDRB per Kapita	Rp.	23,5 juta	
		6	Skor PPH	Angka	87.2	
	Meningkatnya daya saing daerah	1	Produktivitas Daerah	Angka	30.81	Peningkatan daya saing ekonomi daerah
		2	PDRB per Kapita (juta rupiah)	(juta rupiah)	23,5	
		3	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0.19	
Misi IV Meningkatkan pelayanan dasar dan prasarana publik untuk	Tujuan IV : Terwujudnya Pertumbuhan yang Berkeadilan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan					
	Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	1	IPM	Angka	68.88	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang
		2	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	6.92	

Misi	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2020	Prioritas 2020
kesejahteraan yang merata		3	Angka Melek Huruf penduduk 15 tahun ke atas	%	98.29	berkompeten dan memiliki daya saing
		4	Rata-Rata Usia Harapan Hidup	tahun	72.81	
		5	Angka Kematian Ibu	Angka	63.34	
		6	Angka Kematian Bayi	Angka	6.06	
		7	Prevalensi Balita Gizi kurang	Angka	1.27%	
		8	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Angka	0.66%	
		9	Persentase KK yang mendapatkan akses sanitasi dasar	%	79.86%	

Misi	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2020	Prioritas 2020
		10	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	%	69.04%	
	Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	1	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	94.97	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkompeten dan memiliki daya saing
		2	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	47.38	
		3	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Satuan	2.12	
		4	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.13	
		5	Prosentase Penduduk Berakte Kelahiran	%	91.23%	
		6	Presentase Penduduk Ber	%	99.40%	

Misi	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2020	Prioritas 2020
			KTP			
	Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	1	Indeks Gini	Angka	0.32	Pengurangan kesenjangan wilayah
		2	Indeks Williamson	Angka	0.32	
	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan	1	Persentase Angka Kemiskinan	Angka	13.10%	Percepatan penanggulangan kemiskinan
		2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	2.96	
		3	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	1.015	
	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.70	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkompeten dan memiliki daya saing
		2	Partisipasi Angkatan Kerja	%	75.91	
		3	Dependency Ratio	%	53.20	

Misi	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2020	Prioritas 2020
		4	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94.80	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkompeten dan memiliki daya saing
Misi V Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah	Tujuan V : Terwujudnya Prinsip Berkelanjutan dan Berkesinambungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Prinsip Keseimbangan					
	Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66.39	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2020	Prioritas 2020
	Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan	1	Rasio elektrifikasi	%	100%	
	Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	1	Indeks Resiko Bencana	Angka	122	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

